
ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Kusmiran¹⁾, Khairunnas Rajab²⁾, Muhammad Faisal³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: bangkusmiran@gmail.com
Khairunnasrajab@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini dilatar belakangi oleh berbagai perubahan kurikulum yang telah dialami. Sehingga muncul anggapan dari beberapa pihak berupa „ganti menteri ganti kurikulum“. Kurikulum adalah upaya institusi pendidikan dalam merencanakan dan mengatur tujuan, isi dan bahan pelajaran beserta cara yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan pemberian kegiatan-kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hakikat kurikulum dan mengetahui kebijakan dan perkembangan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan kurikulum (PAI) prakemerdekaan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Dalam pelaksanaannya kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan bahwa pendidikan agama islam mengalami dinamika sejalan dengan sikap politik pemerintah terhadap umat islam.

Kata kunci: Kebijakan kurikulum, Pendidikan agama Islam, Indonesia

Abstract

This writing is motivated by a variety of curriculum changes that have been experienced. So there is an assumption from several parties in the form of 'replace minister for curriculum change'. The curriculum is the effort of educational institutions in planning and organizing goals, content and learning materials along with ways used in an effort to influence students to be able to learn both indoors and outdoors by providing activities under the responsibility of the school to achieve educational goals that are predetermined. This writing aims to determine the nature of the curriculum and know the policies and development of Islamic religious education curriculum in Indonesia, focusing on the development of pre-independence, old order, new order, and reform order curricula (PAI). In the implementation of this study uses a literature approach with descriptive analysis methods. This study found that Islamic religious education experiences dynamics in line with the government's political attitude towards Muslims.

Keywords: Curriculum policy, Islamic Religious Education, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam program pendidikan, kurikulum merupakan pedoman mendasar untuk kelangsungan proses belajar mengajar (Anwar, & Mulyani, 2018). Sukses tidaknya pendidikan dapat ditinjau dari mampu tidaknya anak didik menyerap pendidikan yang diberikan dan cara pendidik dalam memberikan pengajaran serta berhasil tidaknya tujuan pendidikan, yang dibuktikan dengan adanya ujian akhir untuk mata pelajaran yang telah diikuti.

Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal kurikulum dan terbiasa dengan berbagai perubahan yang telah dialami oleh kurikulum (Sukino, 2017; Utami, 2018; Anwar, & Mulyani, 2018; Manaf, & Omar, 2018; Budi, & Apud, 2019). Sehingga seringkali muncul anggapan dari beberapa pihak berupa „ganti menteri ganti kurikulum“. Masyarakat Indonesia telah mengenal KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), serta KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bahkan saat ini muncul kurikulum 2013 yang sudah mulai bergulir di beberapa sekolah sekitar 6400-an sekolah yang sudah menjalankan kurikulum baru tersebut.

Pemerhati pendidikan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Slamet Sutrisno mengatakan, bahwa setiap ada pergantian menteri selalu membawa paket baru dalam masa kepemimpinannya. Hal tersebut semakin memperkuat argumen masyarakat bahwa setiap pergantian kabinet selalu

memunculkan polemik baru di kalangan pendidikan dan masyarakat umum, selalu terjadi transisi budaya yang dibawa setiap kali ada perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah yang menjabat saat itu. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Berangkat dari bahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelusuran terkait Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bersama dengan adanya pembahasan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses penghimpunan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui literatur-literatur yang penulis peroleh di perpustakaan berupa buku- buku ataupun artikel-artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian, dan aspek-aspek pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kurikulum

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia, perlu penulis paparkan terlebih dahulu definisi kurikulum. Secara bahasa kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga yaitu *curere* yang berarti „jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish“. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan (Hasbullah, 2017). Dalam bahasa Arab istilah “kurikulum” diartikan dengan *manhaj* yang berarti „jalan yang terang“, atau „jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya“. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik serta nilai-nilai yang ada (Subekhan, 2018). Sedangkan pengertian kurikulum yang tertuang dalam undang- undang sisdiknas Nomor 20/2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Abdul Manab, 2015:1).

Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Kurikulum dalam istilah pendidikan sebagaimana pendapat Ronald C. Doll “*The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learner gain knowledge and understanding, develop, skills and alter attitudes appreciations and values under the auspice of that school*” (kurikulum sekolah adalah muatan dan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pembelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah) (Ronald C.Doll, 1996:15). Sedangkan menurut Prof. Mohamad Ansyar, Ph. D. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan/atau materinya yang akan dipelajari, atau yang akan diajarkan guru kepada siswa (Mohamad Ansyar, 2015:22).

Berdasarkan definisi kurikulum di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah upaya institusi pendidikan dalam merencanakan dan mengatur tujuan, isi dan bahan pelajaran beserta cara yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan pemberian kegiatan-kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Asas-Asas Kurikulum

Mengembangkan kurikulum bukan sesuatu yang mudah dan sederhana karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak pertanyaan yang dapat diajukan untuk diperhitungkan (Nasution, 2014:10). Segala pertanyaan yang muncul itu menyangkut asas-asas yang mendasari setiap kurikulum. Adapun asas-asas kurikulum menurut Nasution dalam *Asas-Asas Kurikulum*

(2014), yakni :

1. Asas Filosofis, yang berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara.
2. Asas Psikologis, yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum yakni psikologi anak, perkembangan anak, dan psikologi belajar, bagaimana proses belajar anak.
3. Asas Sosiologis, yaitu keadaan masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia berupa pengetahuan, dan lain-lain.

3. Tujuan Kurikulum Pendidikan

Alasan untuk mengklarifikasi tujuan bahwa sekolah harus mampu untuk membatasi tekanan dari aneka sumber untuk menetapkan fokus pada pelajaran, maka menurut Abdul Manab dalam *Manajemen Perubahan Kurikulum* (2015) tujuan kurikulum pendidikan dikategorikan sebagai berikut :

1. *The student knows and is able to apply basic scientific and technological processes.*
2. *The student is able to use the conventional language, instruments, and operations of science.*
3. *The student is able to classify organisms according to their conventional faunomic categories.*
4. *The student is able to correctly classify cuttings the results.*

Dari sistem terminologi bahwa pengakuan keluaran pengajaran memiliki karakter penting dari semua level perencanaan level dari keadaan umum digunakan untuk mewakili pembelajaran yang berubah-ubah dengan kebutuhan pada perencanaan pada tiap-tiap level organisasi sekolah (Abdul Manab, 2015:22)

4. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam dapat diartikan sebagai (1) kegiatan menghasilkan kurikulum PAI; atau (2) proses mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik; dan/atau (3) kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI (Muhaimin, 2012:10).

Pengembangan kurikulum PAI ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut :

1. Perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI (Hasbullah, Juhji, & Maksun, 2019).
2. Perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran nilai-nilai agama islam.
3. Perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut.
4. Perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, pesertadidik, masyarakat untuk mendefinisikan tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.

5. Kebijakan dan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Secara historis, sampai dengan abad XIX pendidikan islam masih banyak diselenggarakan oleh institusi masjid maupun pesantren (Hanun Asrahah, 1999:71). Berikut akan dipaparkan perkembangan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan disertai dengan ciri masing-masing:

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pra Kemerdekaan

Pendidikan pada prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasilnya bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah. Pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pada mulanya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan namun murni hanya mencari rempah-rempah. Meski demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama. Karena itu pada abad ke-16 dan 17, mereka mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka tapi juga penduduk pribumi yang beragama Kristen (M.Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003:31).

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama

Seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan, bahwa kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan. Kurikulum pada era orde lama dibagi menjadi 2 kurikulum, yaitu :

a. Kurikulum 1947

Kurikulum 1947 oleh karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946 (Sutrisno dan Muhyidin Al-Barobis, 2012:50).

b. Kurikulum 1952-1964

Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu (Sutrisno dan Muhyidin Al-Barobis, 2012:52).

Selain itu, Depag juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari pondok Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudiandisahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu (Sutrisno dan Muhyidin Al-Barobis, 2012:52).

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Baru

Peralihan dari era orde lama ke orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku di era orde lama juga turut berganti, dan tidak cukup disitu, di era orde baru kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Di bawah ini adalah kurikulum yang berlangsung selama era orde baru antara lain :

a. Kurikulum 1968

Boleh dibbilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Fokus kurikulum ini tidak lagi pancawardhana sebagaimana kurikulum 1964. Hanya saja, pelaksanaan pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964 (Mulyasa, 2003:32).

b. Kurikulum 1975

Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup

signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapat porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa – masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan (Mulyasa, 2003:32).

c. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum 1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 3 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum (Mulyasa, 2003:33).

d. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum – kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai – nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama islam akhirnya berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional (Mulyasa, 2003:33).

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi

Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya :

a. Kurikulum KBK

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan – kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera. Sebagai salah satu dampak dari laju reformasi adalah dibuatnya sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK (E. Mulyasa, 2003:39). Dengan diterapkannya kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama islam, akhirnya madrasahpun menjadikan “kompetensi”, sebagai basisnya (Toto Suharto, 2011:97).

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006

KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah / sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agamayang dikeluarkan KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri agama mendatangi PERMENAG No.2 tahun 2008, menyangkut standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI (Sutrisno dan Muhyidin Al-Barobis, 2015:53).

c. Kurikulum 2013

Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013-2014. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Selain belajar juga tidak hanya terjadi di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembelajaran sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan (M.Asri, Jurnal Program Studi PGMI, 2, September 2017:200).

6. Kebijakan Perubahan Kurikulum yang Komprehensif

Lahirnya kurikulum yang menjebak (kontroversial) karena sedikitnya empat faktor sebagai berikut : *pertama*, faktor yang bersumber dari birokrasi, terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan di kalangan birokrat mengenai peran kurikulum. *Kedua*, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar – dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran program kurikulum. *Ketiga*, faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan para guru. *Keempat*, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, terutama karena tidak ada kuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan (Winarno Surakhmad, 2009:67).

Sementara itu, untuk menghindari dualisme (kurikulum ganda) berkepanjangan dan beragam kerumitan, barangkali perlu dipertimbangkan : *pertama*, pemerintah membuat “Pedoman Pembelajaran Sementara Masa Transisi” (kurikulum darurat, sesuai Mendikbud tentang “Darurat Pendidikan”) atau apapun namanya. *Kedua*, pemberlakuannya dimulai akhir semester genap tahun pelajaran semester genap, sehingga pada semester ganjil semua sekolah menggunakan dasar operasi pembelajaran yang sama (Prastowo, 2018; Hayati, 2015).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum yang kemungkinanberhasillebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, dan bukti – bukti empiris yang ramah kepada guru. Sementara itu, untuk memperbaiki kurikulum maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kurikulum pendidikan agama islam pra kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama islam masa orde lama, kurikulum pendidikan agama islam masa orde baru, kurikulum pendidikan agama islam masa reformasi. Peralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, untuk memperbaiki kurikulum maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya

REFERENSI

- Ansyar Mohammad. (2015). *Kurikulum, Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Anwar, A., & Mulyani, N. (2018). Kurikulum Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 1-8.
- Asrahah Hanun. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Asri, M. (2017) “*Dinamika Kurikulum di Indonesia*”, Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 4 No. 2
- Budi, A. M. S., & Apud, A. (2019). Peran Kurikulum Kulliyatul Mu“allimin al-Islamiyah (KMI)
- Gontor 9 dan Disiplin Pondok dalam Menumbuhkembangkan Karakter Santri. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(01), 1-10.
- Doll Ronald C. (1996). *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*, Boston : Allyn and Bacon
- Hariatiningsih Ayu Novia, “*Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*”, Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 4 No. 2, Mei-Agustus 2016,

- Hasan M. Ali dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2003,
- Hasbullah, H. (2017). Model Pengembangan Kurikulum PAUD. *Aş-şIbyāN: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(01), 21-28.
- Hasbullah, H., Juhji, J., & Maksun, A. (2019). Strategi Belajar Mengajar Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 17-24. doi: 10.33650/edureligia.v3i1.859
- Hayati, N. (2015). Manajemen Pesantren dalam Menghadapi Dunia Global. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1(02), 97-106. doi:10.32678/tarbawi.v1i02.2006
- Manab Abdul, *Manajemen Perubahan Kurikulum*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015,